

Kebijakan Publik Menuju ASEAN Economic Community 2015

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si*
Candra.asmara@yahoo.co.id

Abstract

Asean Economic Community 2015 representing policy or decision with South East Asia nations, to race the growth of political economy clump. The policy of to be come challenge for every member state of Asean to can to compete in moving forward society economics, so that nations in South East Asia can be parallel with the nations go forward the European continent and American. This Condition become the challenge to Indonesian nation in mengahdapi Asean Economic Community 2015. Public policy compiled and executed during the time, not yet can give the better room in improving society economics. This condition [is] diperparah again with the existence of bureaucracy behavior which longer progressively menghawatirkan to their performance. Member state [of] Asean in general have made various policy in face of Asean Economic Community 2015, by improving human resource ability, industrialize and give the easy service in have invesment. Indonesia still many constraint in inculcating invesment so that affect to economic growth, which is on finally Indonesia ability in competing progressively weaken and progressively terpuruk in face of globalization current, specially Asean Economic Community 2015.

Keyword: *Public Policy and Develop; Build the Area Economics.*

Pendahuluan

Indonesia telah memasuki babak baru yang disebut dengan era pasca reformasi dalam urutan sejarah bangsa ini. Di era ini, siapapun bebas berbuat apa saja dan berkreasi semau kita tanpa ada yang perlu ditakutkan dan ada yang membungkam. Maka di era inilah kita seharusnya bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maju dengan kemajuan ekonomi dan pendidikan yang merata. Dengan instrumen-instrumen yang sudah dijelaskan di atas, maka sekali lagi pemerintah dan yang lebih penting kepada masyarakat menyadari bahwa dunia sedang bergerak ke zaman yang benar-benar berbeda dan penuh tantangan.

Perkembangan ekonomi dunia, khususnya perkembangan ekonomi kawasan atau regional Asia Tenggara (Asean), telah memberikan perhatian khusus bagi setiap negara-negara Asean tergolong kedalam negara-negara dunia ke-3 untuk memacu pertumbuhan ekonomi mereka ke arah yang lebih baik, sehingga negara Asean mampu sejajar dengan negara-negara yang lebih maju (negara dunia ke-1 dan ke-2). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menepakati untuk melakukan kerjasama kawasan dari berbagai bidang dalam rangka meningkatkan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

* Dosen Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerja sama di bidang ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*) (Rahadian, 2014).

Fokus dalam tulisan ini adalah melihat kesiapan Bangsa Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community/AEC* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015. Berdasarkan laporan *The Global Competitiveness Index 2013–2014*, *World Economic Forum 2013* dalam Rahadian (2014) menjelaskan kondisi Indonesia untuk melaksanakan investasi dinilai belum cukup kompetitif sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Ranking Indoensia dalam Kompetisi Global

No.	Negara	Rank	Score
1	Singapore	2	5.61
2	Malaysia	24	5.03
3	Brunei	26	4.95
4	Thailand	37	4.54
5	Indonesia	38	4.53
6	Laos	48	4.08
7	Phillipines	59	4,29
8	Vietnam	70	4.18
9	Kamboja	88	4.01
10	Timor leste	138	3.25
11	Myanmar	139	3.23

Sumber : *The Global Competitiveness Index 2013–2014*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di ranking 38 dibawah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Dalam menghadapi realisasi *Asean Economic Community 2015*, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat

negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi *Asean Economic Community* pada tahun 2015 yang akan datang.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini dan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015. Kebijakan yang ada saat ini masih perlu dilakukan upaya perbaikan demi terlaksananya kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global di kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini.

Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Pengambilan kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (2001:14) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku yang dipilih mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang. Menurut Wibawa, dkk (2001:4) menjelaskan bahwa, guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Lebih lanjut Topatimasing (2000:41) menjelaskan bahwa upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Menurut Dunn (2003:68) masalah kebijaksanaan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan pemerintah. Informasi mengenai masalah dan potensi pemecahannya, dihasilkan melalui penerapan prosedur analisis kebijaksanaan perumusan masalah. Proses perumusan masalah kebijaksanaan tidak mengikuti aturan-aturan defenitif, karena masalah kebijaksanaan itu sendiri sedemikian kompleks.

Pandangan diatas dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan menetapkan secara formal apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh suatu lembaga. Kebijakan sarannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar kinerja dari suatu lembaga, termasuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi Masyarakat ekonomi Asean tahun 2015.

2. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Menurut Emil Salim dalam Subandi (2005:14) ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah;

- a) Peranan Negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara)
- b) Dalam sistem ekonomi Pancasila, hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis.

- c) Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila.
- d) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran masyarakat.
- e) Sistem ekonomi pancasila tidak bebas nilai.

Pandangan tentang sistem ekonomi Pancasila di atas merupakan landasan dasar dalam membentuk sistem ekonomi yang di anut bangsa Indonesia, dimana nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pengatur sistem ekonomi dan juga sebagai ideologi dalam menuntun ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global terutama Masyarakat ekonomi Asean tahun 2015.

3. Pandangan tentang Perdagangan Internasional

Menurut Strahm (1999:102) yang mengatakan bahwa, dalam Perdagangan internasional, negara-negara berkembang adalah pendatang kedua, dan karenanya dianaktirikan dan baanyak menemui rintangan. Negara-negara barat membentuk struktur perdagangan internasional yang sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan mereka. Sedangkan negara-negara komunis tidak memainkan peranan yang berarti. Banyak negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah –dulu disebut ”barang-barang koloni”. Naik turunnya harga barang-barang ini sangat dipengaruhi oleh spekulasi dan akhirnya sangat merugikan negara produsen.

Selanjutnya menurut Edy Suandi Hamid (2006:59) yang mengatakan bahwa, peran perdagangan internasional cukup penting khususnya negara-negara eksportir, termasuk Indonesia untuk mencari seluas-luasnya pasar yang potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan ekspor. Pandangan ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia dituntut menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi nilai impor. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, yang sudah didepan mata. Lebih lanjut Edy Suandi Hamid (2006:60) mengatakan bahwa negara yang memiliki daya saing paling tinggi untuk komoditi barang elektronik adalah Singapura disusul oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat daya saing yang paling rendah.

Analisis Implementasi Kebijakan Publik dalam menghadapi Asean Community 2015 bagi Masyarakat Indonesia

Implementasi kebijakan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, dapat dilihat dari beberapa teori implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwar III dalam Indiahono (2009:31) mengatakan bahwa model implementasi kebijakan publik, menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi,

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, belum maksimalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga sosialisasi dari kebijakan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, belum mampu diserap oleh masyarakat, sehingga kesipan Indonesia dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, masih gamang karena negara kita masih banyak persoalan ekonomi yang belum mampu mengangkat ekonomi masyarakat.

b. Sumber daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Belum adanya kebijakan yang khusus dalam mewujudkan sumber daya yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015. Kondisi ini akan mengkhawatirkan kita, dimana persaingan SDM dengan negara-negara Asean khususnya Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam, kita akan mengalami kekakuan dalam bersaing merebut pangsa pasar kerja.

c. Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah, kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan/program.

Aktor kebijakan yang menjadi pioner dalam melahirkan kebijakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, belum mempunyai komitmen yang kuat dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang strategis dibidang ekonomi. Selain dari pada itu integritas pembuat kebijakan juga perlu dipertanyakan, mengingat banyaknya aktor-aktor kebijakan dinegara kita banyak yang tersandung

berbagai kasus hukum, yang pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berimbas terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Birokrasi di Indonesia masih memberikan peluang hambatan bagi investasi di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015. Untuk mengetahui birokrasi dalam pengurusan investasi di beberapa negara, dapat dilihat dari gambaran tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Prosedur Birokrasi di Beberapa Negara.

NEGARA	PROSEDUR	DURASI (HARI)
CINA	12	41
INDIA	11	89
INDONESIA	12	151
KORSEL	12	22
MALAYSIA	9	30
FILIPINA	11	50
SINGAPURA	7	8
VIETNAM	11	56
THAILAND	8	33
USA	5	5

Sumber : Global Market Standar Chartered Bank dalam Edy Suandi Hamid (2006:46)

Birokrasi yang lamban dan terlalu berbelit serta memiliki banyak prosedur akan memberikan dampak terhadap kesiapan negara kita dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015. Untuk kesiapan Indonesia sendiri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat bahwa kesiapan Indonesia saat ini sudah berada di atas 80%, sejajar dengan Malaysia namun di bawah Singapore sedikit. Menurutnya Indonesia akan siap 100% di akhir tahun 2015. Namun berlainan dengan pendapat Pak Menteri, Ekonom yang juga Direktur *ECONIT*, Hendri Saparini, berpendapat Indonesia masih belum siap bahkan hingga akhir 2015. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan komprehensif dari pusat untuk menyambut Komunitas ASEAN. (www.tempokini.com/.../kebijakan-pro-indonesia-untuk-melindungi-lapa...)

Untuk menghadapi *Asean Economic Community* 2015 perlu ditetapkan kebijakan khusus yang dapat menguatkan posisi Indonesia dalam persaingan Global. Hal ini dikemukakan oleh Felix Kusmanto (2014) Untuk kebijakan yang sangat mungin untuk diketatkan implementasinya adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 yang menekankan bahwa orang asing yang bekerja di Indonesia haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan tenaga kerja Indonesia belum mempunyai keahlian tersebut. Kemudian Tenaga kerja asing mempunyai masa kontrak dan tenaga kerja asing harus dapat melakukan transfer pengetahuan, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat juga berkembang. Kenyataan saat ini?
2. Kebijakan untuk mempermudah atau mendukung kegiatan pengembangan kompetensi (Capacity Building) dalam perusahaan untuk terus mengasah kemampuan pekerja maupun untuk mempromosikan konsep lifelong learning. Dapat mengambil contoh Human Resource Development Fund Malaysia dan Juga Skills Development Levy milik Singapura. Hal seperti ini lah yang membuat pelatihan sangat mudah dilakukan di Malaysia, Singapore dan Thailand.
3. Sesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang masa akan datang. Kurikulum harus dibangun dengan fokus dalam pengembangan kemampuan berbahasa Inggris, menggunakan computer, berperilaku sesuai dengan konteks dan ketrampilan berpikir kritis.
4. Sosialisasi konsep dan juga strategi pemerintah dalam menghadapi ASEAN 2015.
5. Pelatihan dan sertifikasi yang secara konsisten dilakukan untuk memastikan tenaga kerja kita dapat menjadi tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ASEAN dan Global.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keselarasan kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di kawasan Asean yang sudah menetapkan adanya *Asean Economic Community* 2015.

Simpulan

Mengingat menurut dokumen cetak biru Komunitas ASEAN, konsep Arus Bebas bukanlah hal yang absolut atau benar-benar dapat diartikan secara harfiah. Arus Bebas dalam konteks pasar bebas ASEAN adalah arus yang masih dapat diatur sesuai dengan hukum dan regulasi Negara setempat. Jadi intinya Indonesia masih memiliki kurang lebih beberapa bulan lagi untuk menyelesaikan PR-PRnya dan menciptakan dan/atau

mengetatkan kebijakan-kebijakan tenaga kerja untuk menjadi lebih Pro-Indonesia, karena *Asean Economic Community 2015* akan diberlakukan akhir Desember 2015.

Sumber Bacaan.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.

Edy Suandi Hamid. 2006. *Ekonomi Indonesia : Dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Yogyakarta : UII Press.

Felix Kuswanto. 2014 Direktur Kinerman Institute. (www.tempokini.com/.../kebijakan-pro-indonesia-untuk-melindungi-lapa...)

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta. Gava Media.

Laswell dan Kaplan. 2001. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Subandi. 2005. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung Alfabeta.

Strahm, Rudolf H.1999. *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.

Topatimasang, Roem. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wibawa, Samodra, dkk. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi.

www.stiami.ac.id/download/get/27/proceeding-pak-rahardian.